INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

DAMPAK BELANJA DESA DAN MODAL SOSIAL TERHADAP INDUSTRI PERDESAAN

Alijon Adit*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok
aditalijon@gmail.com

Riatu M. Qibthiyyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok
riatu.mariatul@ui.ac.id

*Alamat Korespondensi: aditalijon@gmail.com

ABSTRACT
Village expenditures are still focused on the development of basic infrastructures, even though there are other potential investments in villages through the development of rural industries that are resistant to crises and have an impact on the community's economy. The development of this potential can be done by combining village expenditures with social capital, in the form of mutual assistance and cooperatives, which exist in the village. This study aims to determine the relationship between village expenditures and social capital with rural industries. The research data is in the form of cross-sectional data, from the Ministry of Villages and Podes 2018, and processed with OLS. The findings of this study include: 1) community empowerment expenditure, and social capital have a positive and significant relationship to rural industries; and 2) the expenditure's allocation that is devoted to the needs of village industries also increases the number of micro and small enterprises in the village. The improvement of rural industries can be encouraged through adjustments in the field of expenditures, expenditures efficiency, and special allocations for industrial needs. On the other hand, the village government needs to collaborate with business actors in building and empowering village industries as well as playing an active role in the maintenance and development of mutual cooperation and cooperatives in their area. Further studies are recommended to use the amount or ratio of expenditure for the benefit of rural industries..

Keywords: *development; empowerment; rural industries; social capital; village expenditures*

ABSTRAK
Belanja desa masih berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar, padahal terdapat potensi investasi lain di desa yaitu melalui pengembangan industri perdesaan yang tahan terhadap krisis dan memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Pengembangan potensi tersebut dapat dilakukan dengan mengombinasikan belanja desa dengan modal sosial, berupa gotong royong dan koperasi, yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja desa dan modal sosial dengan industri perdesaan. Data penelitian berupa *cross-sectional data*, dari Kemendesa dan Podes 2018, dan diolah dengan OLS. Temuan dari penelitian ini antara lain: 1), belanja pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap industri perdesaan; dan 2) alokasi belanja yang dikhususkan untuk keperluan industri desa turut meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil perdesaan di desa tersebut. Kemajuan industri perdesaan dapat didorong melalui penyesuaian bidang pembelanjaan, efisiensi belanja, dan alokasi khusus keperluan industri. Di sisi lain pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam membangun dan memberdayakan industri desa serta berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan gotong royong dan koperasi di wilayahnya. Kajian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah atau rasio belanja untuk kepentingan industri perdesaan.

Kata kunci: pembangunan; pemberdayaan; industri perdesaan; modal sosial; belanja desa

KLASIFIKASI JEL:
H72, R58

CARA MENGUTIP:
Adit, A. & Qibthiyyah, R. M. (2022). Dampak belanja desa dan modal sosial terhadap industri perdesaan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(2), 145-159.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Porsi terbesar belanja desa diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan rata-rata mencapai 55,17% pada kurun waktu 2016-2019 (BPS, 2018b, 2019b, 2020, 2021). Meski demikian, The World Bank (2020) menyatakan bahwa belanja desa sebelum dan setelah adanya Dana Desa masih menunjukkan kemiripan pola, yakni investasi pada infrastruktur berskala kecil dan belum mengarah pada pemenuhan potensi investasi yang lebih besar dan lebih strategis.

Salah satu potensi investasi tersebut adalah usaha mikro dan kecil yang memiliki ketahanan terhadap krisis, penyerapan tenaga kerja, dan memengaruhi pengurangan kemiskinan (BPS, 2019a; Hermanto & Suryanto, 2020; Nursini, 2020; Tambunan, 2019). Pada tahun 2018 terdapat 4,26 juta usaha mikro dan kecil dengan pekerja sejumlah 9,43 juta orang. Pemerintah desa diharapkan mampu membina dan membantu industri mikro dan kecil agar dapat berkembang (BPS, 2019a).

Di luar masalah tersebut, warga perdesaan memiliki rasa kekeluargaan, saling percaya, gotong royong, jejaring dan norma sosial yang masih dijunjung di perdesaan. Undang-undang Desa menyatakan bahwa pendapatan asli desa salah satunya berasal dari gotong royong dan menyatakan bahwa pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Gotong royong memungkinkan adanya bantuan modal dan tenaga kerja bagi pelaku usaha di desa. Modal sosial dalam bentuk gotong royong memberikan solusi bagi para pelaku usaha di desa (Lukiyanto & Wijayaningtyas, 2020). Gotong royong menciptakan jejaring antar warga. Jejaring ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk belajar mengembangkan usahanya (Soetanto, 2017).

Hatta meyakini bahwa koperasi merupakan ekspresi modern dari gotong royong, yang merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia, yang memiliki semangat solidaritas tanpa memerhatikan perhitungan ekonomi (Higgins, 1958). Gotong royong yang melembaga ke dalam bentuk koperasi memberikan jejaring maupun wawasan terhadap masyarakat pelaku usaha dan menjadi salah satu sumber permodalan usaha (Faedlulloh, 2017; Fatimah & Darna, 2011). Industri mikro dan kecil melakukan kemitraan dengan koperasi melalui pinjaman uang, pengadaan bahan baku, pemasaran, barang modal, mesin dan lainnya (BPS, 2019a). Dengan demikian gotong royong dan koperasi memiliki kaitan dengan industri mikro dan kecil di perdesaan.

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Secara statistik, lebih dari 80% belanja desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selebihnya digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan kejadian tak terduga.
- The World Bank (2020) menyampaikan bahwa belanja desa belum mengarah pada potensi investasi yang lebih besar dan lebih strategis. Industri mikro dan kecil memiliki potensi tersebut.
- Pemerintah desa perlu melakukan efisiensi belanja pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta menyesuaikan alokasi kedua belanja tersebut untuk kepentingan industri di desa.

Sudah terdapat penelitian terdahulu terkait belanja desa khususnya penggunaan Dana Desa, tetapi belum ada penelitian yang mengaitkannya dengan industri mikro dan kecil di desa. Arifin et al. (2020) melakukan studi terkait dampak Dana Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Studi Aslan et al. (2019) dilakukan untuk mengetahui dampak Dana Desa dan belanja desa atas pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan perdesaan di Kabupaten Mahakam Ulu. Arham & Hatu (2020) melakukan studi terkait korelasi Dana Desa dengan ketimpangan (*inequality*) dan kemiskinan perdesaan. Watts et al. (2019) meneliti potensi penggunaan Dana Desa untuk mendanai kegiatan konservasi dan reforestasi di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pemaparan singkat ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan antara belanja desa (yang terdiri dari belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, persentase belanja pembangunan, dan alokasi kedua jenis belanja) dan modal sosial (gotong royong dan koperasi di desa) dengan industri mikro dan kecil di perdesaan.

STUDI LITERATUR

Pembangunan

Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa pembangunan adalah proses peningkatan kualitas hidup dan kemampuan manusia. Pembangunan melibatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*sustenance*), penghargaan diri individu (*self-esteem*), dan kebebasan memilih (*freedom*). Ketiga hal tersebut senantiasa menjadi kebutuhan fundamental bagi manusia dalam setiap masyarakat maupun budaya. Tiga sasaran yang harus ada dalam setiap pembangunan adalah: 1) peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar; 2)

peningkatan tingkat kehidupan (*levels of living*); dan 3) perluasan pilihan sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Todaro & Smith, 2011). Selain itu desain pembangunan yang baik memungkinkan tercerminnya kebutuhan dan preferensi komunitas dan informasi lokal. Pada era sebelumnya pembangunan terkadang merusak nilai-nilai tradisional, tetapi saat ini pembangunan pun berfokus pada nilai-nilai budaya sebagai kekuatan untuk menyatukan masyarakat (Stiglitz, 1998).

Secara singkat pembangunan merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, penghargaan atas dirinya, dan kebebasan memilih dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan preferensi dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan investasi dan belanja desa di bidang pembangunan desa merupakan salah satu wujud investasi tersebut

Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses aktif dan partisipatif dari orang atau kelompok sehingga memperoleh kuasa yang lebih besar atas kehidupan dan hak mereka dan mengurangi marjinalisasi (Peterson, 2014). Pemberdayaan adalah proses perolehan pengaruh atas peristiwa dan dampak kepentingan (Fawcett et al., 1995). Pemberdayaan dalam pendekatan non relasi-sosial adalah kemampuan mencapai tujuan satu pihak atau seseorang sebagai gabungan kemampuan, hambatan, atau keterjangkauan dari pihak lain atau lingkungan sekitar (Pratto, 2016). Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemberdayaan dapat dilakukan dengan: 1) modal usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat; 2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 3) pengembangan sarana prasarana dan jaringan pemasaran desa; 4) penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi; 5) perbaikan sistem informasi desa (Sumodiningrat & Wulandari, 2016).

Pemberdayaan menjadi salah satu hal krusial dari proses pencapaian tujuan pembangunan, peningkatan kepuasan hidup, dan berdampak positif bagi ekonomi dan tingkat hidup komunitas (Hossain et al., 2019; Manaf et al., 2018; Park, 2019). Pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat memiliki kuasa yang lebih besar untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kepuasan hidup maupun kesejahteraannya.

Pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan sumber daya. Dalam lingkup desa terdapat belanja di bidang pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Peningkatan kapasitas yang didapatkan warga desa memungkinan mereka untuk mengetahui hak, potensi, maupun kemampuan yang mereka miliki. Melalui belanja pemberdayaan masyarakat tersebut, warga desa diberikan peluang untuk mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan kapasitas mereka

Modal Sosial

Para aktor dalam *original institutional economic* memiliki berbagai pengalaman. Kemudian mereka mendapatkan berbagai informasi terkait masyarakat, alam, maupun teknologi dan saling berbagi mental dan pengalaman dengan aktor lain sehingga muncul mental komunitas (Groenewegen et al., 2010). Interaksi para aktor memunculkan mental komunitas didasari adanya saling berbagi pengalaman dan mental para aktor dan hal tersebut lantas menjadi modal bagi komunitas maupun aktor. Modal ini tampak sejalan dengan konsep modal sosial.

Fukuyama (2001) berpendapat bahwa modal sosial adalah norma informal yang membuat dua individu atau lebih untuk bekerja sama dan diaktualisasikan dalam hubungan antar manusia. Norma pendorong tersebut terkait dengan kejujuran, pemenuhan komitmen, pelaksanaan amanah, maupun timbal balik. Modal sosial berperan penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi modern. Sejalan dengan pendapat Fukuyama, Prayitno et al. (2019) menyatakan bahwa modal sosial berperan sama penting dalam perekonomian dan dan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Interaksi yang membentuk modal sosial, seperti komunikasi maupun kerja sama, didasari untuk mencapai tujuan bersama. Rustiadi & Nasution (2017) menyatakan bahwa hubungan sosial antar individu atau rumah tangga dalam kelompok berdampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat luas.

Akumulasi modal sosial pada gotong royong berasal dari norma, nilai, dan kelembagaan yang berkembang antar generasi. Gotong royong dilandasi nilai spiritual yang terwujud dalam tindakan untuk kepentingan bersama atau komunitas (Slikkerveer, 2019). Secara tradisional praktik gotong royong di Jawa Tengah dan Jawa Timur dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Lambat laun praktik gotong royong di Indonesia dilakukan untuk menutupi kekurangan peran negara dalam mensejahterakan masyarakat (Suwignyo, 2019).

Studi dari Bowen (1986) menyebutkan bahwa gotong royong memiliki tiga bentuk, yakni pertukaran pekerja (*labor exchange*), timbal balik umum (*generalized reciprocity*), dan pengerahan pekerja (*labor mobilized*). Pertukaran pekerja, baik

antar individu maupun kelompok, lazim ditemui pada kegiatan pertanian. Timbal balik umum menitikberatkan pada kewajiban tiap individu untuk membantu sesama warga yang membutuhkan karena mereka pun pernah dibantu orang lain saat membutuhkan. Pengerahan pekerja terkait dengan perbaikan fasilitas umum seperti sistem irigasi atau jalan. Dari ketiga bentuk gotong royong tersebut, pertukaran pekerja merupakan bentuk gotong royong yang digunakan dalam membantu proses produksi secara langsung.

Seiring perkembangannya nilai gotong royong menjadi dasar dari munculnya koperasi. Higgins (1958) dalam studinya menyatakan bahwa Hatta memercayai koperasi merupakan ekspresi modern dari nilai gotong royong. Senada dengan pernyataan tersebut Firdausy (2018) menyatakan bahwa koperasi sebagai gerakan untuk mewujudkan perekonomian yang berdasar atas kekeluargaan dan kebersamaan (gotong royong). Tujuan koperasi berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan anggota maupun masyarakat dan hal tersebut sejalan dengan nilai gotong royong dalam membantu sesama

Industri Perdesaan

Bird (1988) dalam Baidi & Suyatno (2018) menyampaikan bahwa penciptaan bisnis atau nilai baru bagi usaha yang dijalankan merupakan niatan dari berwirausaha. Lebih lanjut mereka menyampaikan bahwa setidaknya terdapat dua faktor yang memengaruhi kewirausahaan, yakni internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri atas sikap, keinginan, atau kemampuan seseorang untuk berwirausaha. Faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan sosial ekonomi, maupun lingkungan bisnis. Wilkinson (2002) sebagaimana dalam Munizu et al. (2016) menyampaikan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan yang pro bisnis dapat mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian pemerintah desa selaku salah satu faktor eksternal berpotensi mengembangkan industri perdesaan melalui kebijakan yang dibuatnya.

Fritsch & Wyrwich (2017) di dalam penelitiannya menemukan bahwa daerah dengan tingkat wirausaha yang tinggi di masa lalu cenderung terus mengalami pembentukan bisnis baru hingga 50 tahun kemudian dan berefek positif pada pertumbuhan daerah. Dengan demikian salah satu sumber penting pembangunan daerah adalah budaya kewirausahaan. Studi yang dilakukan Sá et al. (2019) menemukan bahwa kewirausahaan berdampak pada perekonomian, sosial, dan budaya di daerah. Kewirausahaan daerah menstimulasi pariwisata daerah, sehingga menstimulasi perekonomian daerah serta penyedia lokal. Dari sisi sosial, kewirausahaan menciptakan lapangan kerja, lingkungan wirausaha, dan bisnis yang menyediakan kebutuhan lokal. Dari sisi budaya, kewirausahaan meningkatkan produk dan tradisi lokal.

Dalam studi ini, industri mikro dan kecil merupakan salah satu bentuk dari bisnis atau kewirausahaan. Industri mikro memiliki jumlah pekerja paling banyak empat orang, sedangkan industri kecil memiliki jumlah pekerja antara lima sampai dengan 19 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan pengusaha (BPS, 2018a).

Dengan demikian pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial yang terdapat di perdesaan merupakan beberapa faktor eksternal dari industri perdesaan. Belanja pembangunan yang dikeluarkan desa menghasilkan sarana dan prasarana desa yang bermanfaat untuk memudahkan pergerakan warga, barang, dan jasa. Belanja pemberdayaan masyarakat memungkinkan adanya kegiatan untuk mengembangkan potensi desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat, terutama pelaku usaha. Modal sosial berupa gotong royong memungkinkan adanya bantuan finansial maupun non finansial bagi pelaku usaha yang menjadi salah satu solusi bagi industri perdesaan.

Belanja pembangunan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan untuk kepentingan industri perdesaan menjadi sebuah kebijakan probisnis dari pemerintah desa. Sebagaimana disampaikan Wilkinson (2002) dalam Munizu et al. (2016) bahwa kebijakan semacam itu dapat membantu perkembangan industri perdesaan. Alokasi belanja untuk kepentingan industri memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap perkembangan industri perdesaan. Pembangunan sarana dan prasarana industri perdesaan dapat mendorong warga dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam industri tersebut. Peningkatan kapasitas warga dan pelaku usaha mewujudkan sebuah komunitas usaha yang memiliki kesamaan pengetahuan mengenai pengelolaan industri perdesaan

Studi Terkait

Telah banyak dilakukan penelitian terkait Dana Desa maupun belanja desa. Lewis (2015) menemukan bahwa masalah Dana Desa meliputi alokasi transfer, kesiapan pemerintah desa, dan mekanisme pengawasan. Masalah yang harus segera diatasi adalah terkait audit Dana Desa. Arifin et al. (2020) menemukan bahwa Dana Desa meningkatkan jumlah BUMDes, tetapi tidak terbukti adanya BUMDes tersebut meningkatkan kesempatan kerja penduduk desa. Watts et al. (2019) mengemukakan bahwa dalam penggunaan Dana Desa, masyarakat lebih memilih menggunakannya untuk mendukung kegiatan

ekonomi yang berdampak langsung pada mereka alih-alih digunakan untuk lingkungan. Antlöv et al. (2016) menyampaikan bahwa pengurangan kemiskinan melalui Dana Desa bisa terwujud jika masyarakat diberdayakan dan terdapat kelembagaan desa yang kuat dan demokratis. Dengan memperhatikan kapasitas desa dalam mengelola peningkatan dana. Meutia & Liliana (2017) menyampaikan bahwa *multiplier effect* dari Dana Desa belum dirasakan karena belanja di desa belum sesuai ketentuan. Tarlani & Sirajuddin (2020) menyampaikan bahwa Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan ekonominya.

Westlund & Bolton (2003) mengemukakan bahwa modal sosial memengaruhi surplus produsen serta memengaruhi kewirausahaan secara langsung maupun tidak langsung. Prayitno et al. (2019) berpendapat bahwa nilai modal sosial yang tinggi memengaruhi keputusan eks pekerja migran untuk membuka usaha. Lukiyanto & Wijayaningtyas (2020) menemukan bahwa gotong royong menjadi salah satu sumber modal bagi pelaku usaha Mereka saling berbagi tips, meminjam kebutuhan usaha, dan membangun sarana usaha.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data belanja bidang pembangunan desa dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2017 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Data modal sosial menggunakan data Podes 2018 pada blok kegiatan gotong royong dan koperasi. Podes 2018 diselenggarakan sekitar triwulan I 2018 dan mengumpulkan data setahun ke belakang. Dengan demikian Podes 2018 masih menggambarkan kondisi desa di tahun 2017.

Tabel 1. Daftar Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan
Variabel Dependen	
Industri Perdesaan (*vind2018*)	Jumlah usaha mikro dan kecil di desa (unit)
Variabel Independen	
Belanja Pembangunan Desa (*develop*)	Jumlah belanja pembangunan tiap desa tahun 2017 (juta rupiah)
Belanja Pemberdayaan Masyarakat (*empower*)	Jumlah belanja pemberdayaan masyarakat tiap desa tahun 2017 (juta rupiah)
Persentase Belanja Pembangunan (*percentdev*)	Persentase belanja pembangunan terhadap total belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat (persen)
Alokasi Belanja Pembangunan – Sarana dan Prasarana Industri Perdesaan (*ind_dev*)	*Dummy* alokasi belanja pembagunan untuk sarana dan prasaran industri perdesaan 1 = terdapat alokasi belanja 0 = lainnya
Alokasi Belanja Pemberdayaan – Pengelolaan Industri Perdesaan (*ind_emp*)	*Dummy* alokasi belanja pemberdayaan untuk pengelolaan industri perdesaan 1 = terdapat alokasi belanja 0 = lainnya
Modal sosial (*soscap*)	*Dummy* kebiasaan gotong royong dan keberadaan koperasi 1 = kebiasaan gotong royong tinggi dan ada koperasi 0 = lainnya
Variabel Kontrol	
Pendidikan Kepala Desa – sekolah menengah (*midedvhead*)	*Dummy* tingkat pendidikan Kepala Desa 1 = Kepala Desa tamatan pendidikan tingkat menengah (SMP/SMA) 0 = lainnya
Pendidikan Kepala Desa – perguruan tinggi (*hiedvhead*)	*Dummy* tingkat pendidikan Kepala Desa 1= Kepala Desa tamatan pendidikan tingkat tinggi 0 = lainnya
Pendidikan Sekretaris Desa – sekolah menengah (*midedvsec*)	*Dummy* tingkat pendidikan Sekretaris Desa 1= Sekretaris Desa tamatan pendidikan tingkat menengah (SMP/SMA) 0 = lainnya
Pendidikan Sekretaris Desa – perguruan tinggi (*hiedvsec*)	*Dummy* tingkat pendidikan Sekretaris Desa 1= Sekretaris Desa tamatan pendidikan tingkat tinggi 0 = lainnya
Topografi desa (*plains, valley*)	*Dummy* topografi desa, misal: 1 = *plains* (dataran) 0 = lainnya

Indonesian Treasury Review
Vol.7, No.2, (2022), Hal 145-159

Variabel	Keterangan
Sinyal telepon seluler (ponsel) dan internet (*signal*)	*Dummy* sinyal ponsel dan internet 1 = sinyal ponsel dan sinyal internet baik 0 = lainnya
Pengguna listrik (*hhep*)	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Lapangan usaha sumber penghasilan utama warga (*agri; mining; industry; tradenresto; transwarehousecom; service*)	*Dummy* lapangan usaha sumber penghasilan utama warga, misal: 1 = *agri* (pertanian) 0 = lainnya
Status tingkat kemajuan desa (*disadvantaged; developing; developed; independent*)	*Dummy* status kemajuan desa, misal: 1 = *developed* (maju) 0 = lainnya

Sumber: Diolah Penulis (2021)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah industri perdesaan (*vind2018*), yang merupakan industri mikro dan kecil di perdesaan. Industri perdesaan merupakan perwujudan dari kewirausahaan dan berdasarkan Sá et al. (2019) kewirausahaan di suatu daerah akan mendorong perekonomian daerah. Pembagian industri mikro dan kecil didasarkan pada jumlah tenaga kerja. Jumlah industri mikro paling banyak empat orang termasuk pengusaha, sedangkan industri kecil memiliki jumlah pekerja paling banyak 19 orang termasuk pengusaha (BPS, 2018a). Variabel *vind2018* merupakan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang terdapat di desa, yang terdiri dari delapan kelompok industri yakni industri dari kulit, industri dari kayu, industri logam mulia dan bahan dari logam, industri anyaman, industri gerabah/keramik/batu, industri dari kain/tenun, industri makanan dan minuman, dan industri lainnya.

Belanja bidang pembangunan desa dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat memiliki jumlah belanja terbesar setelah belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua belanja tersebut memiliki keterkaitan dengan industri karena regulasi yang mengatur tentang belanja desa memungkinkan adanya penggunaan kedua belanja tersebut untuk pengembangan ekonomi desa. Dalam kajiannya, Kemendesa (2018) menyatakan bahwa hingga 2018 Dana Desa cenderung digunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, embung, irigasi, dan sejenisnya) dan mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan belanja pembangunan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat sebagai variabel independen pada penelitian ini. Variabel *develop* menunjukkan jumlah belanja pembangunan, variabel *percentdev* menunjukkan persentase belanja pembangunan desa terhadap total belanja pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan variabel *empower* menunjukkan jumlah belanja pemberdayaan masyarakat.

Guna mempertajam analisis pada penelitian ini, penulis pun menggunakan variabel independen lain berupa belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan untuk kegiatan terkait dengan industri perdesaan. Variabel *ind_dev* menunjukkan bahwa terdapat belanja bidang pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana industri perdesaan. Variabel *ind_emp* menunjukkan adanya belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan industri perdesaan.

Variabel independen selanjutnya adalah gotong royong dan keberadaan koperasi di desa (*soscap*) sebagai proksi dari modal sosial karena modal sosial memengaruhi kewirausahaan dan perekonomian suatu wilayah (Lukiyanto & Wijayaningtyas, 2020; Prayitno et al., 2019; Rustiadi & Nasution, 2017; Westlund & Bolton, 2003). Lebih lanjut gotong royong antar warga menimbulkan jejaring antar warga yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mempelajari atau mengembangkan potensi usahanya (Soetanto, 2017).

Penulis menambahkan variabel kontrol untuk memperkaya analisis dan untuk mengontrol faktor lain yang bisa saja mengganggu hasil pengujian variabel independen yang digunakan. Variabel kontrol yang ditambahkan terkait dengan pemerintahan desa, keterbukaan desa, kemajuan desa, dan karakteristik masyarakat. Pemerintah lokal merupakan promotor, pengembang potensi desa, dan fasilitator berbagai kendala menjadi pendorong (Kemendesa, 2018; Sá et al., 2019). Pemerintah desa merupakan penanggung jawab belanja desa yang dituntut memiliki kapasitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Kapasitas seseorang dalam mengolah informasi dan membuat keputusan kritis berkaitan dengan tingkat pendidikannya dan pengelolaan belanja desa berkaitan dengan kapasitas pengelola dananya (Antlöv et al., 2016; Harmadi et al., 2020; Kemendesa, 2018; Oreopoulos & Salvanes, 2011; Sá et al., 2019). Variabel kontrol yang digunakan untuk mewakili pemerintahan desa adalah tingkat pendidikan Kades (*midedvhead* dan *hiedvhead*) dan tingkat pendidikan Sesdes (*midedvsec* dan *hiedvsec*).

Variabel kontrol keterbukaan desa diwakili oleh topografi desa di kawasan dataran (*plains*),

lembah (*valley*), sinyal ponsel dan internet yang baik (*signal*) dan persentase rumah tangga pengguna listrik (*hhep*). Hal-hal tersebut menyangkut keterjangkauan desa dan memberikan dukungan keterbukaan desa (Kemendesa, 2018; Qin et al., 2020).

Kebutuhan dan preferensi komunitas dapat tercermin dari pembangunan di daerah tersebut (Stiglitz, 1998). Belanja desa dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa (The World Bank, 2020). Maka dari itu sebagai proksi dari preferensi masyarakat atau masalah yang dihadapinya, penelitian ini menggunakan variabel kontrol sektor mata pencaharian utama masyarakat desa yang terdiri dari sektor pertanian (*agri*), pertambangan (*mining*), industri pengolahan (*industry*), perdagangan besar/eceran dan rumah makan (*tradeandresto*), angkutan, pergudangan, dan komunikasi (*transwarehousecom*), dan jasa (*service*).

Tingkat kemajuan desa menjadi salah satu pertimbangan prioritas pembelanjaan dari Dana Desa. Untuk itu penelitian ini memasukkan variabel kontrol berupa tingkat kemajuan desa yang dibagi menjadi Desa Tertinggal (*disadvantaged*). Desa Berkembang (*developing*), Desa Maju (*developed*), dan Desa Mandiri (*independent*). Tingkat kemajuan desa dapat diketahui dari status indeks desa membangun (IDM) setiap desa.

Sampel penelitian ini terdiri dari 53.026 desa yang memperoleh Dana Desa. Penentuan sampel didasarkan pada kelengkapan data belanja pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, kesesuaian kode wilayah desa dan nama desa dari data Kemendesa dengan data Podes 2018, keberadaan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, sektor mata pencaharian utama masyarakat desa, dan status IDM.

Penelitian ini dilakukan terhadap hasil Pendataan Potensi Desa pada satu waktu saja yaitu tahun 2018 sehingga menggunakan data *cross sectional*. Data *cross-sectional* adalah data tentang satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada titik waktu yang sama. Penggunaan data sejenis ini memiliki masalah heterogenitas (Gujarati, 2015).

Persamaan Penelitian

Persamaan model dasar penelitian untuk variabel dependen industri perdesaan adalah sebagai berikut:

$$vind2018_i = \beta_0 + \beta_1 develop_i + \beta_2 percentdev_i + \beta_3 empower_i + \beta_4 ind_dev_i + \beta_5 ind_emp_i + \beta_6 soscap_i + \mu_i$$

(Persamaan 1)

Variabel *vind2018_i* merupakan variabel dependen penelitian yang menunjukkan jumlah usaha mikro dan kecil perdesaan pada desa i. Variabel $develop_i$ menunjukkan jumlah belanja pembangunan dalam juta rupiah pada desa i. Variabel $percentdev_i$ menunjukkan persentase belanja pembangunan terhadap total belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat di desa i. Variabel *empower*i berarti jumlah belanja pemberdayaan masyarakat desa i dalam satuan juta rupiah. Variabel ind_dev_i merupakan *dummy* di mana angka 1 menunjukkan adanya alokasi belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana industri pada desa i. Variabel ind_emp_i merupakan *dummy* di mana angka 1 menunjukkan adanya alokasi belanja pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan industri perdesaan desa i. Variabel independen selanjutnya yaitu $soscap_i$ merupakan *dummy*, dengan angka 1 berarti adanya kebiasaan gotong royong yang baik dan koperasi di desa i.

Guna mempertajam analisis, persamaan model dasar tersebut ditambahkan dengan variabel kontrol, sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut:

$$vind2018_i = \beta_0 + \beta_1 develop_i + \beta_2 percentdev_i + \beta_3 empower_i + \beta_4 ind_dev_i + \beta_5 ind_emp_i + \beta_6 soscap_i + \delta Control_i + \mu_i$$

(Persamaan 2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi

Rata-rata belanja pembangunan pada desa sampel adalah Rp 815,1 juta dengan nilai terkecil sebesar Rp 1,84 juta dan terbesar sejumlah Rp 510,68 miliar. Total belanja pembangunan pada desa sampel mencapai Rp 43,22 triliun. Persentase belanja pembangunan secara rata-rata sebesar 85,95% dengan nilai terkecil sejumlah 0,446% dan persentase terbesar senilai 99,98%. Rata-rata belanja pemberdayaan masyarakat adalah Rp 123,5 juta dengan nilai terkecil belanja bidang pemberdayaan masyarakat adalah Rp 300 ribu dan nilai terbesarnya mencapai Rp 13,664 miliar. Total belanja pemberdayaan masyarakat pada desa sampel mencapai Rp 6,55 triliun. Total belanja pembangunan desa secara nasional pada tahun 2017 mencapai Rp 55,784 triliun dan total belanja pemberdayaan masyarakat mencapai Rp 8,164 triliun (BPS, 2019b).

Selama tahun 2016-2019, rata-rata belanja pembangunan desa secara nasional mencapai 55,17% atau sekitar Rp 53,752 triliun., sedangkan rata-rata belanja pemberdayaan masyarakat adalah 7,79% atau sekitar Rp 7,633 triliun (BPS, 2018b, 2019b, 2020, 2021). Kondisi belanja desa seperti ini tidak menyalahi regulasi terkait belanja desa. Desa tidak diwajibkan untuk mengalokasikan belanja

pada setiap bidang dengan persentase tertentu atau persentase minimal. Regulasi hanya mengatur paling sedikit 70% belanja desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30% digunakan untuk penghasilan/tunjangan dan operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Regulasi memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola keuangannya

Hasil Estimasi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa semua variabel independen (belanja pembangunan, persentase belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, dan alokasi belanja untuk keperluan industri perdesaan) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel dependen (industri perdesaan). Hasil estimasi disajikan pada Tabel 1 berikut dan secara lengkap disajikan pada Tabel 2 pada Lampiran.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Estimasi

vind2018	Model 1	Model 2
(1)	(3)	(5)
develop	0.000257	0.000144
	(0.000277)	(0.000200)
percentdev	0.547***	0.360***
	(0.182)	(0.125)
empower	0.0536**	0.0357**
	(0.0236)	(0.0161)
ind_dev	5.511***	3.868***
	(0.918)	(0.902)
ind_emp	9.241***	7.077***
	(1.126)	(1.069)
soscap	16.17***	9.142***
	(0.928)	(0.874)
Variabel Kontrol	Tidak	Ya
Constant	-38.60**	-37.81***
	(18.29)	(13.09)
Observations	53,026	53,026
R-*squared*	0.023	0.058

*Robust standard errors in parentheses, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1*

Sumber: Diolah Penulis (2021)

Pembahasan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa besaran/jumlah belanja pembangunan desa (*develop*) memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan, meskipun secara statistik tidak signifikan. Jika variabel ini signifikan, maka nilai koefisien develop sebesar 0,000144 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan belanja pembangunan sebesar satu juta rupiah berkaitan dengan peningkatan 0,000144 unit industri desa. Dengan perhitungan lain, setiap peningkatan belanja pembangunan sebesar 6,9 miliar berhubungan dengan satu unit industri desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh desa tidak memberikan perbedaan berarti bagi industri perdesaan. Belanja pembangunan memungkinkan adanya peningkatan jumlah atau kualitas dari jalan desa, jembatan, pasar desa, dan sarana dan prasarana lainnya. Namun demikian, desa tampaknya belum berhasil melakukan efisiensi belanja pembangunan. Efek pengganda (*multiplier effect*) yang diharapkan terjadi dari jumlah belanja pembangunan desa belum dirasakan oleh industri perdesaan. Kondisi tersebut sejalan dengan dengan penelitian dari The World Bank (2020) yang menyatakan bahwa meskipun telah ada tambahan anggaran dari Dana Desa, belanja bidang pembangunan masih digunakan untuk infrastruktur berskala kecil seperti jalan akses, pasar, air bersih, ataupun irigasi kecil dan belum digunakan untuk investasi strategis. Efisiensi belanja pembangunan perlu dilakukan agar pembangunan sarana dan prasarana tersebut memberikan efek pengganda yang dapat dirasakan oleh semua warga desa, khususnya pelaku usaha di desa.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa persentase belanja pembangunan (*percentdev*) memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik dengan industri perdesaan. Hal ini dapat diartikan adanya dukungan belanja pembangunan terhadap industri perdesaan. Pembangunan yang dilakukan di desa pada umumnya ditujukan untuk kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman, hingga pariwisata. Pembangunan yang dilakukan tersebut tidak hanya terkait pengadaan sarana dan prasarana baru, tetapi juga pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya. Pemerintah desa tetap harus melakukan pembangunan desa sebagai upaya untuk memastikan sarana dan prasarana tersebut tetap berfungsi dengan baik untuk menunjang aktivitas warga desa. Untuk kebutuhan tersebut, belanja pembangunan desa memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan belanja bidang lainnya.

Tabel 3. Hasil Estimasi Penelitian

Variabel Dependen: Industri perdesaan (*vind2018*)	Model 1	Model 2
(1)	(2)	(3)
Variabel Independen		
Belanja pembangunan	0.000257	0.000144
(*develop*)	(0.000277)	(0.000200)
Persentase belanja	0.547***	0.360***

Variabel Dependen: Industri perdesaan (*vind2018*)	Model 1	Model 2
(1)	(2)	(3)
pembangunan (*percentdev*)	(0.182)	(0.125)
Belanja pemberdayaan masyarakat (*empower*)	0.0536** (0.0236)	0.0357** (0.0161)
Alokasi belanja pembangunan - sarana dan prasarana industri (*ind_dev*)	5.511*** (0.918)	3.868*** (0.902)
Alokasi belanja pemberdayaan masyarakat - pengelolaan industri (*ind_emp*)	9.241*** (1.126)	7.077*** (1.069)
Kebiasaan gotong royong dan keberadaan koperasi (*soscap*)	16.17*** (0.928)	9.142*** (0.874)
Variabel Kontrol		
Desa di dataran (*plains*)		-10.70*** (1.003)
Desa di lembah (*valley*)		-7.228*** (1.520)
Sinyal ponsel dan internet baik (*signal*)		3.000*** (0.648)
Persentase rumah tangga pengguna listrik (*hhep*)		0.0368*** (0.0111)
Pendidikan Kades – sekolah menengah (*midedvhead*)		3.849*** (0.809)
Pendidikan Kades – perguruan tinggi (*hiedvhead*)		6.049*** (1.052)
Pendidikan Sesdes – sekolah menengah (*midedvsec*)		3.846*** (0.691)
Pendidikan Kades – perguruan tinggi (*hiedvsec*)		6.391*** (0.931)
Pertanian (*agri*)		4.345 (3.534)
Pertambangan dan galian (*mining*)		-0.239 (4.082)
Industri pengolahan (*industry*)		58.84*** (5.421)
Perdagangan besar/eceran dan rumah makan (*tradenresto*)		5.545 (4.115)
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi (*transwarehousecom*)		10.67 (12.34)
Jasa (*service*)		10.38** (4.575)
Desa Tertinggal (*disadvantaged*)		3.593*** (0.602)
Desa Berkembang (developing)		12.11*** (0.828)
Desa Maju (*developed*)		26.80*** (2.092)
Desa Mandiri (*independent*)		51.38*** (8.606)
Constant	-38.60** (18.29)	-37.81*** (13.09)
Observations	53,026	53,026
R-*squared*	0.023	0.058

*Robust standard errors in parentheses, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1*

Sumber: Diolah Penulis (2021)

Nilai koefisien variabel persentase belanja pembangunan (percentdev) sebesar 0,360 diartikan sebagai peningkatan 1% belanja pembangunan berhubungan dengan peningkatan 0.360 unit usaha mikro dan kecil perdesaan. Angka ini bisa diartikan: jika persentase belanja pembangunan ditingkatkan 3%, maka hal tersebut berkaitan dengan peningkatan satu unit usaha mikro dan kecil perdesaan. Penulis berekspektasi bahwa koefisien tersebut bernilai lebih dari satu, sebagai sinyal bahwa persentase belanja pembangunan yang ada saat ini sudah cukup untuk mendorong munculnya atau berkembangnya industri perdesaan. Meskipun demikian, belanja pembangunan yang tercermin melalui variabel percentdev ini memberikan kesempatan atas peningkatan jumlah atau kualitas sarana dan prasarana desa. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut, misalnya jalan dan jembatan yang baik, memungkinkan terjadinya peningkatan kelancaran arus barang ke suatu desa, sehingga bahan baku produksi relatif lebih mudah didapatkan oleh pelaku usaha. Peningkatan tersebut pun turut memperlancar distribusi produk industri perdesaan. Dengan demikian tumbuhnya industri perdesaan dapat terjadi seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana di desa. Warga desa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan baku dan mendistribusikan produknya secara relatif lebih mudah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2019) yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun desa memberikan pengurangan waktu tempuh dan memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas umum. Hal senada disampaikan

Tabel 4. Jumlah desa yang memiliki alokasi belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan untuk keperluan industri desa

No	Alokasi Belanja Pembangunan	Alokasi Belanja Pemberdayaan	Jumlah Desa	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Perdesaan	Rata-rata Usaha Mikro dan Kecil Perdesaan
1	Ya	Ya	4.613	167.733	36
2	Ya	Tidak	6.614	173.963	26
3	Tidak	Ya	3.583	110.816	31
4	Tidak	Tidak	38.216	700.506	18

Sumber: BPS (2018)

oleh Fajri & Rarasati (2019) yang menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di desa meningkatkan kualitas infrastruktur sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih baik pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian belanja pembangunan, baik dalam jumlah (*develop*) maupun persentasenya (*percentdev*), digunakan untuk memastikan sarana dan prasarana desa dapat berfungsi dengan baik bagi warga masyarakat. Namun, efisiensi belanja pembangunan harus diperhatikan agar semua lapisan masyarakat desa mendapatkan manfaat dari efek pengganda pembangunan tersebut.

Hasil estimasi terhadap variabel belanja pemberdayaan masyarakat (*empower*) menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan. Desa menggunakan belanja pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan sumber daya desa. Peningkatan kapasitas masyarakat ini setidaknya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga mereka lebih mampu untuk bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat, terutama pilihan atas pemenuhan kebutuhan dan kesejahterannya. Dengan kata lain belanja pemberdayaan masyarakat ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat desa, termasuk potensi untuk membuka usaha mikro dan kecil perdesaan.

Hasil estimasi variabel pemberdayaan masyarakat (*empower*) sesuai dengan temuan Manaf et al. (2018) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyakarat bernilai positif terhadap ekonomi masyarakat. Hasil estimasi tersebut menunjukkan pula bahwa Dana Desa dalam belanja bidang pemberdayaan masyakarat telah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan ekonominya (Tarlani & Sirajuddin, 2020).

Nilai koefisien belanja pemberdayaan masyarakat (*empower*) adalah 0,0357 yang berarti setiap peningkatan satu juta rupiah belanja pemberdayaan masyarakat berkorelasi dengan peningkatan 0.0357 unit usaha mikro dan kecil perdesaan. Angka tersebut bisa diartikan: jika belanja pemberdayaan masyarakat ditingkatkan hingga 29 juta rupiah maka hal tersebut berkaitan dengan peningkatan satu unit usaha mikro dan kecil perdesaan. Nilai koefisien ini bisa diartikan bahwa belanja pemberdayaan masyarakat belum cukup efisien untuk mendorong industri perdesaan. Namun setidaknya belanja pemberdayaan ini memberikan kesempatan bagi perkembangan industri perdesaan.

Alokasi belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana industri perdesaan menunjukkan hubungan (korelasi) yang positif dan signifikan secara statistik dengan industri perdesaan. 11.227 dari 53.026 desa sampel (21,17%) mengalokasikan belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana industri. Pada desa-desa tersebut terdapat 341.696 usaha mikro dan kecil perdesaan atau sekitar 29,63% dari total sampel usaha mikro dan kecil perdesaan tahun 2018. Nilai variabel *ind_dev* menunjukkan bahwa secara rata-rata desa yang memilik alokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana industri perdesaan memiliki jumlah usaha mikro dan kecil desa lebih banyak tiga unit dibandingkan dengan desa lainnya.

Alokasi belanja pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan industri perdesaan memiliki hubungan (korelasi) yang positif dan signifikan secara statistik dengan industri perdesaan. 8.196 dari 53.026 desa sampel (18,28%) mengalokasikan belanja pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan industri. Terdapat 278.549 usaha mikro dan kecil perdesaan atau sekitar (24,16%) dari total sampel usaha mikro dan kecil perdesaan tahun 2018. Nilai variabel *ind_emp* menunjukkan bahwa secara rata-rata desa yang mengalokasikan belanja pemberdayaan masyarakat untuk

pengelolaan industri memiliki jumlah usaha mikro dan kecil desa yang lebih banyak tujuh unit dibandingkan desa lainnya.

Alokasi belanja pembangunan dan alokasi belanja pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan industri menunjukkan dukungan pemerintah desa terhadap industri perdesaan. Pembangunan sarana dan prasarana terkait industri perdesaan mendorong warga desa untuk berpartisipasi dalam industri tersebut. Sebagai ilustrasi, pembangunan sentra industri kerajinan oleh pemerintah desa dapat mendorong warga desa untuk membuka usaha kerajinan. Kegiatan pengelolaan industri yang berasal dari alokasi belanja pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi warga dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kegiatan semacam ini memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Alokasi belanja pembangunan dan alokasi belanja pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan bisnis ini merupakan kebijakan yang probisnis. Temuan ini ini sesuai dengan pendapat Wilkinson (2002) dalam Munizu et al. (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan probisnis mendukung perkembangan industri mikro dan kecil.

Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial berupa gotong royong dan koperasi (*soscap*) memiliki hubungan (korelasi) positif dan signifikan dengan industri perdesaan. Gotong royong sebagai modal sosial digunakan untuk kepentingan bersama atau komunitas dan terdapat berbagi kesulitan (*burden sharing*) di dalamnya. Selain itu, terdapat rasa percaya dalam kebiasaan gotong royong. Dengan hal ini pelaku usaha dapat meminta bantuan dari pelaku usaha lain terkait kesulitan yang dihadapi, misalnya kebutuhan tenaga kerja mendesak atau pinjaman modal usaha. Kebiasaan ini menimbulkan rasa aman bagi seseorang untuk memulai atau menjalankan usaha karena dia meyakini bahwa gotong royong akan membantu penyelesaian masalah yang mungkin dihadapinya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Lukiyanto & Wijayaningtyas (2020) yang menyatakan bahwa modal sosial, berupa gotong royong, membantu para pengusaha ternak dalam menjalankan usahanya. Para pengusaha ternak saling membantu dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha, peminjaman peralatan/perlengkapan, hingga tenaga kerja. Kebiasaan seperti ini pun dilakukan oleh pelaku usaha di daerah lain. Penelitian Herliana (2015) menunjukkan bahwa pelaku usaha di Pasar Beringharjo saling bergotong royong dalam menyediakan komoditas bagi pembeli. Mereka tidak mementingkan keuntungan individu dan tidak mempermasalahkan besar atau kecilnya keuntungan. Gotong royong sebagai modal sosial menjadikan usaha kecil, mikro, dan menengah mampu bertahan dan kreatif serta menutupi kebutuhan finansialnya (Susanto, 2017).

Koperasi, sebagai bentuk usaha yang dianggap mewakili gotong royong, memberikan berbagai layanan bagi masyarakat, terlepas dia anggota koperasi atau bukan. Berbagai macam koperasi ada di Indonesia ini, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi industri dan kerajinan, hingga koperasi peternak. Koperasi-koperasi ini memberikan dukungan bagi usaha atau industri melalui pemberian pinjaman usaha, penyediaan bahan baku usaha, hingga menjadi tempat pemasaran produk. Hal-hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga atau pelaku industri untuk memulai atau bahkan mengembangkan usahanya. Sebagai contoh, warga atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan permodalan/keuangan dapat mengajukan pinjaman usaha ke koperasi. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan bantuan koperasi industri dan kerajinan rakyat. Keberadaan koperasi sebagai bentuk formal dari gotong royong memberikan kesempatan bagi warga untuk memulai usahanya atau bagi pelaku industri untuk mengatasi kesulitan usaha yang mereka hadapi.

Hasil estimasi variabel gotong royong dan keberadaan koperasi (*soscap*) pun sejalan dengan beberapa penelitian terkait koperasi. Pelembagaan gotong royong melalui koperasi memberikan jejaring, tambahan wawasan, hingga permodalan bagi pelaku usaha (Faedlulloh, 2017; Fatimah dan Darna, 2011). Pelaku usaha dapat memanfaatkan jejaring sebagai sarana belajar untuk mengembangkan potensi usahanya (Soetanto, 2017). Melalui modal sosial tersebut pelaku usaha memperoleh dukungan dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Penyelesaian masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pun dapat terbantu melalui modal sosial ini.

Modal sosial di masyarakat, berupa gotong royong, hingga kini masih terjaga dengan baik di perdesaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin terbukanya informasi, generasi lebih tua beranggapan bahwa gotong royong di masa kini tidak lebih baik dibandingkan masa lalu. Mereka melihat generasi yang lebih muda lebih individualis dan sibuk mencari uang (Winardi, 2020). Namun demikian, anggapan tersebut tidak sejalan dengan studi Priatama et al. (2020) yang meneliti dampak penggunaan internet terhadap interaksi sosial kaum muda. Mereka menemukan bahwa penggunaan internet meningkatkan modal sosial melalui perluasan jejaring dan penguatan hubungan lokal.

Pemeliharaan gotong royong sebagai modal sosial menjadi tanggung jawab semua pihak di desa, tetapi pemerintah desa dan tokoh masyarakat berperan lebih besar. Desa memerlukan kegiatan berorientasi pada komunitas dan masyarakat umum. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan semacam ini memberikan kesempatan bagi warga untuk berinteraksi antar sesama sehingga memungkinkan penguatan modal sosial masyarakat. Pemeliharaan dan pengembangan modal sosial dari koperasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurusnya saja, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah desa dapat membantu perkembangan koperasi agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha. Melalui bantuan dan dukungan tersebut diharapkan koperasi memiliki peran yang lebih besar terhadap perkembangan dunia usaha di desa. Pemeliharaan gotong royong dan koperasi sebagai modal sosial perlu tetap dilakukan karena modal sosial ini memiliki peranan positif terhadap perkembangan lingkungan sosial maupun ekonomi di desa tersebut

KESIMPULAN

Hasil uji estimasi model menunjukkan bahwa belanja pembangunan, persentase belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, alokasi belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana industri, alokasi belanja pemberdayaan untuk pengelolaan industri perdesaan, dan modal sosial memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan.

Belanja pembangunan desa secara rata-rata lebih besar dibandingkan belanja pemberdayaan masyarakat. Rata-rata persentase belanja pembangunan terhadap total belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat adalah 85,95%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah belanja bidang pembangunan cenderung lebih besar dibandingkan belanja pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan terkait pengelolaan keuangan desa dikarenakan tidak adanya ketentuan terkait kewajiban proporsi belanja setiap bidang.

Gotong royong sebagai modal sosial sudah bertahan lama di Indonesia. Di tingkat desa pemeliharaannya menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat, tetapi pemerintah desa dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Pengembangan koperasi di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurusnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemeliharaan gotong royong dan pengembangan koperasi perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat peranan modal sosial ini terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

Untuk memajukan industri perdesaan penulis menyarankan agar pemerintah desa mengubah rasio belanja bidang pembangunan dan efisiensi belanja. Rasio belanja bidang pembangunan perlu disesuaikan untuk memberikan ruang bagi desa melaksanakan program pemberdayaan. Penyesuaian pun perlu dilakukan terhadap alokasi belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan industri perdesaan.

Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan terkait industri desa. Melalui hal tersebut diharapkan pemerintah desa mengetahui dan mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha dan di sisi lain pelaku usaha memiliki keterikatan dengan program tersebut.

Pemerintah desa selaku pemimpin lokal perlu bersikap aktif dalam memfasilitasi pemeliharaan nilai gotong royong sebagai modal sosial. Pemerintah desa dapat membuat kegiatan berbasis komunitas atau berbasis desa dan melibatkan sebagian besar atau seluruh warga desa. Interaksi yang terjadi selama kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan keterikatan sesama warga desa. Pengembangan koperasi sebagai usaha berlandaskan gotong royong dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan bagi pengurus koperasi

Keterbatasan penelitian ini meliputi: 1) Pengurangan sampel yang cukup besar berdasarkan kebutuhan variabel penelitian. Pengurangan ini tidak berarti menghilangkan bias pada penelitian ini; 2) Penggunaan data *cross-section* sehingga belum dapat digunakan untuk melihat dampak dari belanja desa; 3) Rasio belanja pembangunan hanya dihitung terhadap belanja pemberdayaan masyarakat; dan 4) Penggunaan variabel modal sosial hanya didasarkan pada kebiasaan gotong royong dan keberadaan koperasi.

Kajian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah atau rasio belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan sarana dan prasarana atau pengelolaan industri mikro dan kecil. Dengan demikian diharapkan hasil kajian dapat lebih menggambarkan kondisi belanja desa terkait industri mikro dan kecil desa

REFERENSI

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *52*(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047

Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund

Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(10), 433–442. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, *79*(August), 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Aslan, Darma, D. C., & Wijaya, A. (2019). Have village funds impact growth economy and poverty rate? *International Journal of Scientific and Technology Research*, *8*(10), 2601–2605.

Badan Pusat Statistik. (2018a). *Pedoman Pencacah Desa/Kelurahan Podes 2018 Buku 2*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2018b). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2017*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2019a). *Profil Industri Mikro dan Kecil Tahun 2018*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2019b). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2018*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2019*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2020*. Jakarta.

Baidi, & Suyatno. (2018). Effect of entrepreneurship education, self efficacy and need for achievement toward students' entrepreneurship intention: Case study in FEBI, Iain Surakarta, Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, *21*(2), 1–17.

Bowen, J. R. (1986). On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, *45*(3), 545–561. https://doi.org/10.2307/2056530

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018*. Jakarta.

Faedlulloh, D. (2017). Modal Sosial dan Praktik Gotong Royong Para Pengrajin Gula Kelapa di Desa Ketanda Kabupaten Banyumas. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *2*(2). https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1467

Fajri, M., & Rarasati, A. (2019). Impacts of infrastructure development in the villages of Batang Regency in terms of social, economy, education, and health. *MATEC Web of Conferences*, *270*, 06003. https://doi.org/10.1051/matecconf/201927006003

Fatimah, & Darna. (2011). Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *10*(2), 127–138.

Fawcett, S. B., Paine-Andrews, A., Francisco, V. T., Schultz, J. A., Richter, K. P., Lewis, R. K., ... Lopez, C. M. (1995). Using empowerment theory in collaborative partnerships for community health and development. *American Journal of Community Psychology*, *23*(5), 677–697. https://doi.org/10.1007/BF02506987

Firdausy, C. M. (Ed.). (2018). *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia - Achmad Sani Alhusain, SE* (1st ed.). https://doi.org/9786024337018

Fritsch, M., & Wyrwich, M. (2017). The effect of entrepreneurship on economic development-an empirical analysis using regional entrepreneurship culture. *Journal of Economic Geography*, *17*(1), 157–189. https://doi.org/10.1093/jeg/lbv049

Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, *22*(1), 7–20. https://doi.org/10.1080/713701144

Groenewegen, J., Spithoven, A., & van den Berg, A. (2010). *Institutional Economics An Introduction*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Gujarati, D. (2015). *Econometrics by Example* (*Second*). London: Palgrave.

Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. (2020). *Village Development: Spatial Effect vs The Performance of the Village Government?* Retrieved from http://tnp2k.go.id/download/93404WP52ENGFinal2606.pdf

Herliana, E. T. (2015). Preserving Javanese Culture through Retail Activities in Pasar Beringharjo, Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *184*(August 2014), 206–213. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.081

Hermanto, B., & Suryanto. (2020). Business Ecosystem Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Academy of Entrepreneurship Journal*, *26*(4), 1–7.

Higgins, B. (1958). Hatta and Co-operatives: The Middle Way for Indonesia? *The Annals of the American Academy of Political and Social*

Science, *318*(1), 49–57. https://doi.org/10.1177/000271625831800108

Hossain, M., Asadullah, M. N., & Kambhampati, U. (2019). Empowerment and life satisfaction: Evidence from Bangladesh. *World Development*, *122*, 170–183. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.013

Kemendesa. (2018). *Dinamika Pembangunan Desa Kajian 7 Wilayah Pulau tentang Manfaat Dana Desa di Indonesia*. Retrieved from https://lumbungfile.kemendesa.go.id/index.php/s/eMoyCzfoc9LiAad#pdfviewer

Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. *Public Administration and Development*, *35*(5), 347–359. https://doi.org/10.1002/pad.1741

Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. *Heliyon*, *6*(9), e04879. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04879

Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, *10*(7). https://doi.org/10.3390/su10072142

Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058

Munizu, M., Sumardi, & Armayah. (2016). Study on Determinant Factors of Micro and Small Enterprises Development in South Sulawesi of Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *7*(6), 121–128. https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n6p121

Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, *7*(1), 153–166. https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238

Oreopoulos, P., & Salvanes, K. G. (2011). Priceless : The Nonpecuniary Benefits of Schooling. *The Journal of Economics Perspectives*, *25*(1), 159–184.

Park, J.-D. (2019). Korea's Path of Development in Restrospect. *Re-Inventing Africa's Development*, (1), 177–205. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03946-2

Peterson, N. A. (2014). Empowerment Theory: Clarifying the Nature of Higher-Order Multidimensional Constructs. *American Journal of Community Psychology*, *53*(1–2), 96–108. https://doi.org/10.1007/s10464-013-9624-0

Pratto, F. (2016). On power and empowerment. *British Journal of Social Psychology*, *55*(1), 1–20. https://doi.org/10.1111/bjso.12135

Prayitno, G., Noor, D. S., & Hidayat, A. T. R. (2019). Social Capital, Entrepreneurship and Rural Development. *Journal of Engineering and Scientific Research*, *1*(2), 84–88. https://doi.org/10.23960/jesr.v1i2.29

Priatama, R. A., Onitsuka, K., Rustiadi, E., & Hoshino, S. (2020). Social interaction of indonesian rural youths in the internet age. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(1), 1–27. https://doi.org/10.3390/SU12010115

Qin, X., Li, Y., Lu, Z., & Pan, W. (2020). What makes better village economic development in traditional agricultural areas of China? Evidence from 338 villages. *Habitat International*, *106*(November), 102286. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102286

Rustiadi, E., & Nasution, A. R. (2017). Can social capital investment reduce poverty in rural Indonesia? *International Journal of Economics and Financial Issues*, *7*(2), 109. Retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3904

Sá, E., Casais, B., & Silva, J. (2019). Local development through rural entrepreneurship, from the Triple Helix perspective: The case of a peripheral region in northern Portugal. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, *25*(4), 698–716. https://doi.org/10.1108/IJEBR-03-2018-0172

Slikkerveer, L. J. (2019). *Gotong Royong: An Indigenous Institution of Communality and Mutual Assistance in Indonesia*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_14

Soetanto, D. (2017). Networks and entrepreneurial learning: coping with difficulties. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, *23*(3), 547–565. https://doi.org/10.1108/IJEBR-11-2015-0230

Stiglitz, J. E. (1998). Towards a New Paradigm for Development. *October*, *1*(October), 76–107. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/1491127

Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2016). *Membangun Indonesia Dari Desa Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Susanto, I. (2017). Solusi Pengembangan UMKM Melalui Ontologi. *Performance*, *23*(1), 17. https://doi.org/10.20884/1.performance.2016.23.1.290

Suwignyo, A. (2019). Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s. *Journal of Southeast Asian Studies*, *50*(3), 387–408. https://doi.org/10.1017/S0022463419000407

Tambunan, T. T. H. (2019). The impact of the economic crisis on micro, small, and medium enterprises and their crisis mitigation measures in Southeast Asia with reference to Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, *6*(1), 19–39. https://doi.org/10.1002/app5.264

Tarlani, & Sirajuddin, T. (2020). Rural development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve sustainable development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *447*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012066

The World Bank. (2020). *Indonesian Village Governance under the new Village Law (2015-2018)*. (May).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Boston: Pearson.

Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economics*, (July). https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008

Westlund, H., & Bolton, R. (2003). Local Social Capital and Entrepreneurship. *Small Business Economics*, *21*(2), 77–113. https://doi.org/10.1023/A:1025024009072

Winardi, U. N. (2020). Gotong Royong and the Transformation of Kampung Ledok Code, Yogyakarta. *City and Society*, *32*(2), 375–386. https://doi.org/10.1111/ciso.12291